

Dinamika Dimensi Budaya Kerajinan Ukir Jepara : Dari Seni Hias Dinding Masjid Mantingan Menuju Pasar Internasional

Sri Indrahti^{1*)}

*¹Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia*

**)Korespondensi: indrahti@gmail.com*

Abstract

This article describes the process of the entry of foreign investors and their influence in the management of the carving industry in Jepara (1980-2010). The aim of this research is; identify the problems faced by the carving craft industry in dealing with foreign investors in Jepara, find and thoroughly describe the reactions that arise, find and analyze the socio-cultural interactions of foreigners and indigenous people, find and analyze the process of coming and going of foreign investors, their effects for the sustainability of the carving craft industry. This study uses primary data and secondary data. Primary data include archives stored in the Dinarpus Jepara and Semarang, the Jepara Department of Trade and Industry regarding PMA and PMDN, as well as carving craft business units. Secondary data include the monthly Gema Bumi Kartini magazine published by the Jepara Regency Government, journals, research results relevant to the Jepara carving craft industry in the period of writing. The facts on the ground will be complemented by interviews with key informants, policy makers and communities who are concerned about the sustainability of the carving craft industry. The last stage is historiography by reconstructing based on the data obtained through the process of testing and critical analysis, to present new information about foreign investors in Jepara in the carving craft industry.

Keywords: culture; crafts; international market.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang proses masuknya pemodal asing serta pengaruh yang ditimbulkan dalam pengelolaan industri kerajinan ukir di Jepara (1980-2010). Tujuan dari penelitian ini adalah; mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi industri kerajinan ukir dalam menghadapi pemodal asing di Jepara, menemukan dan mendeskripsikan secara menyeluruh reaksi yang muncul, menemukan dan menganalisis interaksi sosial budaya orang asing dan orang pribumi, menemukan dan menganalisis proses datang-perginya pemodal asing, pengaruh yang ditimbulkan bagi keberlangsungan industri kerajinan ukir. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, antara lain arsip yang tersimpan di Dinarpus Jepara maupun Semarang, Dinas Perdagangan dan perindustrian Jepara tentang PMA dan PMDN, serta unit usaha kerajinan ukir. Data sekunder antara lain majalah bulanan Gema Bumi Kartini bulanan terbitan Pemkab Jepara, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan industri kerajinan ukir Jepara pada periode penulisan. Fakta di lapangan akan dilengkapi dengan wawancara informan pelaku, pengambil kebijakan serta komunitas yang mempunyai kepedulian pada sektor keberlangsungan industri kerajinan ukir. Tahap terakhir adalah historiografi dengan merekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh melalui proses pengujian dan analisis kritis, untuk menyajikan informasi baru tentang pemodal asing di Jepara dalam industri kerajinan ukir.

Kata Kunci: budaya; kerajinan; pasar internasional.

1. Pendahuluan

Industri kerajinan ukir yang berkembang di Jepara, tampaknya sudah menjadi aktivitas ekonomi yang tidak terpisahkan bagi identitas kota Jepara. Kerajinan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tersendiri, terutama pada pengembangan ragam hiasnya. Hal ini tampak pula dari upaya pemerintah untuk menampilkan dan menggunakan interior Istana Presiden dengan mebel ukir Jepara. Bahkan ada ruangan khusus yang disebut ruang Jepara (SP. Gustami, 2000:216-219).

Perkembangan industri kerajinan ukir dapat dikatakan memasuki babak baru, pada sekitar tahun 1980-an, titik awal datangnya pesanan dari luar negeri, antara lain Singapura. Diberitakan bahwa pengrajin Jepara belum sepenuhnya mampu memenuhi jumlah pesanan yang diharapkan (Kompas, Rabo, 27 Agustus 1980 hal 12). Hal ini disebabkan karena persyaratan yang cukup ketat, antara lain setiap pesanan (dalam hal ini daun pintu berukir) mempunyai standart dan mutu yang sama. Kondisi ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pengrajin ukir Jepara, karena melalui pesanan yang ada, maka masalah pemasaran dapat diatasi, namun disisi lain dengan tidak mampunya pengrajin Jepara memenuhi jumlah pesanan, menunjukkan bahwa belum siapnya pengrajin lokal memasuki pasar internasional dengan berbagai aturan yang menyertai, terutama pada kualitas produksi.

Sekitar tahun 1996, penjualan produk mebel Jepara telah ditemukan di Amerika Serikat. Bahkan dalam pemasarannya dikatakan bahwa furniture tersebut merupakan impian yang menjelma menjadi kenyataan yang indah. Dibuat oleh pengrajin lokal, setiap kayu keras memiliki karakteristik dari simpul yang unik, serta kayu dengan variasi tekstur serta tidak mempunyai dua potongan yang sama. Promo penjualan tersebut dilakukan khusus pada liburan yang berarti tidak dikenakan bunga dan pembayaran dilakukan dalam 90 hari setelah memesan sebelum tanggal 11 November 1996. Promo tersebut ditemukan dalam toko-toko penjualan di Amerika Serikat. Barang yang ditawarkan, antara lain : Jepara King Bed, lemari atau meja rias, cermin, kabinet untuk pakaian dalam, lemari laci, dan penyimpanan bangku (Chicago Tribune (Chicago, Illinois), Sun, Nov 3, 1996 · Page 218). Tampaknya, pemasaran produk kerajinan ukir telah sampai ke Amerika Serikat bahkan dengan promosi yang cukup menarik.

Memasuki tahun 2000, beberapa pemberitaan di luar negeri, mempromosikan penjualan lemari buku dari Jepara dengan bahan kayu keras, rak dalam berbagai ukuran dan terdapat laci bawah yang dapat menampung barang koleksi dan buku dalam segala bentuk dan ukuran (*Chicago Tribune* (Chicago, Illinois). Sun, Sep 17-2000. Page 622.

Melalui data yang ada, dapat dikatakan bahwa pada kurun waktu tahun 1980 sampai tahun 2000, pemasaran industri kerajinan ukir telah memasuki pasar internasional melalui pesanan maupun para penanam modal asing melakukan aktivitas di Jepara. Hal ini tampak, tidak hanya pesanan saja yang datang namun beberapa orang asing juga melakukan aktivitas usaha di Jepara, Kondisi ini tentu saja cukup menjadi kekhawatiran pengusaha lokal Jepara, apalagi kehadiran mereka belum mempunyai ijin. Antara lain dari Inggris, Taiwan, Perancis dan Selandia Baru, menjalankan usaha dengan datang ke desa-desa pusat pengrajin ukir, lalu membeli bahan setengah jadi kemudian memproses menjadi barang jadi dan menjualnya ke luar negeri melalui jasa ekspedisi. Bahkan sebagian juga menjual di dalam negeri (Kompas, Selasa 17 Januari 1989, hal. 9).

Pada awalnya, kehadiran orang asing hanyalah sebagai pemesan maupun , pembeli , namun ketika ada perkembangan baru bahwa kehadirannya juga beraktivitas langsung di Jepara, tampaknya hal ini dimaknai oleh para pengusaha lokal sebagai pesaing ataupun ancaman. Beberapa keluhan yang muncul, antara lain, berpindahnya pekerja-pekerja yang ahli di perusahaan-perusahaan pribumi ke perusahaan-perusahaan asing karena alasan tawaran upah yang tinggi.

Aktivitas yang dilakukan pengusaha asing tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan, namun dalam prakteknya ada pengusaha asing yang menempuh dengan melakukan cara lain, yaitu mempersitri perempuan-perempuan lokal (WNI melalui kawin campuran maupun kawin kontrak, dengan harapan untuk melancarkan usahanya. Meskipun data mengenai kawin kontrak masih harus ditelusuri keberadaannya, namun berbagai pemberitaan telah menunjukkan eksistensinya. Pihak KUA Jepara hanya mempunyai data tentang kawin campuran, namun dari data informan masyarakat setempat banyak ditemukan adanya realitas tersebut.

Tulisan yang dimuat di Solo Pos, diungkapkan bahwa Balitbang Kementerian Agama telah melakukan riset tentang fenomena kawin kontrak tersebut pada 2016, mengungkapkan bahwa praktik kawin kontrak di Jepara umumnya didorong oleh faktor ekonomi. Para investor yang berasal dari Eropa, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, hingga Jepang itu harus menikahi wanita Jepara untuk memiliki aset di

kota tersebut. (Solo Pos, Minggu 20 Juni 2021). Namun demikian, hasil penelitian mahasiswa Unnes di desa Tubanan Kembang Jepara tahun 2017, menunjukkan bahwa kawin kontrak pengusaha asing di Jepara dilatarbelakangi faktor ekonomi dan menjadi istri selama di tempat perantauan.

Bertitik-tolak dari kondisi perkembangan yang terjadi, keberadaan penanaman modal asing harusnya memberikan peningkatan pada jumlah dan wilayah persebaran pemasaran industri kerajinan ukir, implikasinya meningkatkan usaha sekaligus tingkat kesejahteraan pelaku dalam lingkungan usaha tersebut. Namun dalam prakteknya peningkatan yang diharapkan hanya dapat dinikmati sementara waktu, dalam perjalanan selanjutnya justru pengusaha hadir sebagai pesaing bagi pengusaha lokal serta berimplikasi pada perubahan nilai-nilai budaya sebagai bagian pengaruh datangnya orang asing tersebut. Adakah penerapan aturan tentang PMA yang tidak konsisten dilakukan oleh pemerintah daerah serta ketidaksiapan pengusaha dan pengrajin lokal memasuki pasar internasional? Apa saja yang menyebabkan, mencoba diangkat dalam tulisan ini.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah, meliputi empat tahap yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi sumber, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi arsip dan sejarah lisan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan bentuk sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis (lisan). Sumber tidak tertulis atau sumber lisan digunakan untuk memberikan informasi yang tidak dapat ditemukan pada sumber tertulis. Oleh karena itu, kajian ini juga akan melibatkan metode oral history. Hal ini dipilih karena metode yang paling dapat digunakan untuk menggambarkan aktivitas perkembangan industri kerajinan ukir pada kurun penelitian memerlukan informasi dari para pelaku ekonomi yang masih beraktivitas dan sebagai upaya melengkapi dokumen sejaman yang ditemukan.

Historiografi (penulisan sejarah), mencoba merekonstruksi imajina dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan analisis kritis. Tahap ini dimaksudkan untuk menyusun fakta-fakta menjadi suatu kesatuan yang sistematis, integral, dan disajikan secara kronologis dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh pembaca.

Aktivitas perkembangan industri kerajinan ukir terutama memasuki tahun 1980-2010 ketika orang asing dan pengusaha asing beraktivitas ekonomi di Jeparan, dapat ditelusuri antara lain melalui arsip yang tersimpan di Dinarpus Jepara maupun Semarang, data yang diolah oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Jepara tentang PMA dan PMDN, serta unit usaha kerajinan ukir, data perkawinan campur di KUA Jepara serta majalah bulanan terbitan Pemkab Jepara.

Data lisan melalui wawancara dilakukan pada informan yang mencakup para pelaku industri kerajinan ukir terdiri atas unsur-unsur tenaga kerja/pekerja, pengrajin, pengusaha (lokal dan asing), pedagang perantara/penghubung/makelar, dan tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal. *Indepth interview* ini dilakukan untuk menggali dan menemukan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkait dengan aktivitas ekonomi dalam industri kerajinan ukir di Jepara.

Data primer dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis baik arsip, dokumen, koran, majalah, laporan-laporan resmi dari instansi terkait mengenai gambaran umum potensi daerah maupun laporan usaha yang dapat menggambarkan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan industri kerajinan ukir. Data-data dari arsip, dokumen, catatan-catatan pribadi, laporan-laporan resmi instansi terkait mengenai peristiwa yang telah terjadi berkaitan dengan sejarah perkembangan industri ukir, dapat dikonstruksi sehingga didapat gambaran yang jelas dari pengalaman kolektif masa lalu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Seni Hias Pada Dinding Masjid Mantingan

Seni kerajinan ukir dikenal oleh masyarakat Jepara sejak abad XVI. Sejak pendirian masjid Mantingan pada tahun 1559 (Panitia Penyusun Hari Jadi Jepara, 1988: 31) telah dijumpai hiasan ukiran. Pada dinding masjid terdapat ukiran pada batu putih dengan pola seni zaman purba (Tim Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, 1997: 17).

Pendirian masjid Mantingan ini diprakarsai oleh Ratu Kalinyamat, berkaitan dengan keinginannya untuk melakukan ibadah. Ratu Kalinyamat mempunyai seorang patih yang bernama Chi Hui Gwan yang pandai mengukir. Berkat kepandaian mengukir inilah, maka patih tersebut diberi nama lain yaitu Sungging Badar Duwung. *Sungging* artinya ahli ukir, dan *badar* artinya batu, *duwung* artinya tatah. Secara keseluruhan dapat diartikan ahli menatah pada batu. Dahulu mengukir menggunakan media batu, kemudian

mengalami perkembangan dengan menggunakan media kayu. Perubahan penggunaan media ini mungkin disebabkan oleh perubahan fungsi ukiran yang tidak hanya digunakan untuk hiasan pada tempat ibadah.

Dari kedua cerita rakyat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketrampilan mengukir yang dimiliki oleh masyarakat Jepara diturunkan oleh seorang tokoh. Tokoh tersebut mempunyai beberapa nama, yaitu *Chi Wie Gwan – Patih Badar Duwung – Prabangkara*. Ada kemungkinan ketiga nama tersebut, tertuju pada satu orang. Dari cerita rakyat itu dapat diambil kesimpulan yang dapat dipahami yaitu bahwa ketrampilan mengukir yang dimiliki oleh masyarakat Jepara berkembang secara turun-temurun (Panitia Penyusun Hari Jadi Jepara, 1988: 3).

Masyarakat Jepara melalui cerita rakyat yang masih terpelihara meyakini bahwa mereka memang ditakdirkan untuk mempunyai ketrampilan mengukir secara turun-temurun. Dengan demikian tanpa melalui belajar secara formal, pada umumnya masyarakat Jepara dapat menjadi tukang ukir.

Dari fungsi hiasan pada tempat ibadah (masjid) ketrampilan mengukir mulai dikenal oleh masyarakat Jepara. Pada awalnya pola hiasan berupa daun-daunan, bunga teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, garis-garis, dan gubahan burung. Dalam ajaran Islam yang diyakini oleh penganutnya sebenarnya mengukir makhluk hidup adalah suatu larangan. Untuk mengantisipasi larangan tersebut, para seniman mencoba menuangkannya dengan cara menyamakan, yaitu dengan menuangkan gambar makhluk hidup dengan jalinan garis dan daun-daunan. Melalui ornamen tersebut seni kerajinan ukiran masih terkesan sebagai hiasan hidup. Hal ini dapat dilihat pada hiasan dinding yang ada di masjid Mantingan, yang antara lain berupa motif tumbuh-tumbuhan, namun di baliknya masih ada motif adegan Ramayana (Tim Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, 1997: 17). Upaya menyamakan ornamen makhluk hidup menjadi garis dan daun-daunan yang dilakukan oleh pengrajin, dalam perkembangannya menjadi ragam yang khas bagi seni kerajinan ukir Jepara.

Tindakan yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat dalam menghias dinding masjid dengan ukiran yang disamakan dapat dikatakan sebagai langkah awal dikenalnya seni kerajinan ukir oleh masyarakat Jepara. Melalui ahli pahatnya Sungging Badar Duwung, masyarakat setempat mulai mengenal ketrampilan mengukir. Apabila dilihat dari fungsinya dapat diduga bahwa ketrampilan mengukir dilakukan untuk aktivitas keagamaan. Fungsi ukiran pada masjid menandakan bahwa seni kerajinan ukir pada masa Ratu Kalinyamat hanya digunakan untuk hiasan masjid (tempat ibadah umat Islam).

3.2. Souvenir Tamu-Tamu dari Luar Jepara dan Luar Negeri

Ketertarikan dan minat Kartini pada seni kerajinan ukir ini tampak dari perhatiannya yang besar pada para pengrajin pada waktu ia diajak oleh ayahnya (Bupati Jepara 1881) R.M. Aria Sasraningrat (*Habis Gelap Terbitlah Terang*, 1985) untuk meninjau kehidupan masyarakat di daerahnya. Melalui pendekatan dengan para pengrajin tersebut, Kartini mengetahui bahwa upah dan hasil pekerjaan pengrajin belum layak. Ketimpangan yang ditemui itu telah mendorong Kartini untuk mencari jalan keluar. Langkah-langkah yang diambil, antara lain mengkoordinasi mereka dan membantu pemasarannya. Kartini memperbolehkan para pengrajin untuk bekerja di sekitar halaman kabupaten. Cara ini dilakukan dengan maksud agar dia lebih mudah terlibat di dalamnya. Pada saat-saat tertentu, Kartini juga menuangkan ide-ide tentang perkembangan motif ukiran melalui gambar, kemudian ada tukang yang melanjutkan dengan memindahkan motif pada kayu yang telah disiapkan.

Kelompok pertukangan yang dikoordinasi oleh Kartini tersebut, dikepalai oleh Pak Singa. Pekerjaan kepala tukang antara lain memimpin seluruh aktivitas dalam pembuatan kerajinan mulai dari menggambar, mengukir perkakas, sampai tahap akhir penyelesaian pekerjaan seperti yang diinginkan oleh pemesan, dengan harapan kualitas hasil kerajinannya mempunyai nilai jual yang tinggi, Kartini juga turut memesan barang seni kerajinan ukir itu. Barang-barang yang dipesan tersebut antara lain peti jahitan, peti rokok dan meja-meja kecil (Kardinah Rekso Negoro, 1978). Ketiga barang yang dipesan Kartini, biasanya selain digunakan sendiri juga dipakai untuk *souvenir* tamu-tamunya yang berasal dari luar Jepara termasuk luar negeri. Barang-barang jenis tersebut sampai sekarang juga masih diminati oleh para pembeli. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa hampir di semua tempat penjualan seni kerajinan ukir dan *souvenir* pasti dijumpai ketiga jenis barang tersebut. Motif gambarnya juga masih tetap sama. Ada kecenderungan, para pengrajin mencoba tetap mempertahankan motif-motif gambar yang berkembang pada masa Kartini, dan keluarganya, mengingat motif tersebut dianggap sebagai ciri khas kerajinan Jepara.

3.3. Pendidikan Formal dan Koperasi

Upaya mengembangkan seni kerajinan ukir yang telah dilakukan Kartini kemudian dilanjutkan oleh beberapa orang yang berminat dan menaruh perhatian bidang ini pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda pada tanggal 1 Juli 1929 memprakarsai pendirian Sekolah Pertukangan dengan jurusan Meubel Ukir (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979: 53) yang beberapa kali mengalami perubahan nama.

Pada masa pemerintahan kolonial, terjadi perubahan nama, berturut-turut dari *Openbare Ambachsschool (1929-1931) – Ambachsschool Voor Inlanders (1931-1932 – Ambacctsleergang (1932-1942)*. Sekolah pertukangan pada masa kolonial Belanda itu bertahan selama dua belas tahun. Setelah kedatangan Jepang di Indonesia, maka terjadi lagi perubahan nama menjadi *Kosyu Gakko (1942-1945* (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979: 53)

Pada masa kemerdekaan terjadi peng-Indonesiaan nama-nama termasuk nama sekolah. Sekolah itu kemudian berganti nama menjadi Sekolah Pertukangan (1945-1950), kemudian menjadi Sekolah Teknik Pertama (1950-1955), dan Sekolah Teknik Negeri 3 (1955) yang merupakan nama yang sampai sekarang masih digunakan. Di sekolah ini terdapat Jurusan Dekorasi Ukir (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979: 53).

Proses pendidikan yang diajarkan meliputi kontruksi mebel serta motif-motif ukir dari ragam hias di Indonesia. Dalam kenyataan di lapangan, ragam hias ukir yang berkembang ada sebagian yang meniru hasil karya di sekolah, namun selebihnya kreasi yang berkembang di masyarakat serta sesuai pesanan.

Tokoh-tokoh yang berjasa dalam mengembangkan ragam hias ini antara lain *R. Ngabehi Pradja Soekemi* yang memimpin *Opanbare Ambachsschool* dengan mengembangkan motif *Majapahit* dan motif *Mataram*. Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh *M. Ngabehi Wignjapangukir* dari Kasunanan Surakarta yang memimpin *Ambachssleergang* dengan mengembangkan motif *Padjadjaran* dan *Bal* (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979:54-58).

Pendirian sekolah yang awalnya diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda ini kemudian dibarengi juga dengan pendirian Perusahaan Daerah pada tahun 1932 dengan melibatkan para bupati Jepara dan Rembang. Perusahaan Daerah yang diberi nama *Jepara's Houtsnijwerl En Meubelmaker (JMH)* ini kemudian digunakan untuk menampung tamatan *Ambachsschool* (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979: 63-65).

Dengan upaya ini tampaknya pemerintah kolonial menaruh perhatian pada industri kerajinan ukir. Jalur pendidikan formal yang dibentuk pada waktu itu diharapkan mampu menggali motif-motif yang ada serta mengembangkannya.

Adapun Perusahaan Daerah yang didirikan sekaligus sebagai wadah untuk merealisasikan gagasan-gagasan dari para tenaga trampil dan mengembangkan industri kerajinan ukir itu sendiri. Dengan demikian pemerintah kolonial Belanda juga merasa bahwa industri kerajinan ukir mempunyai harapan yang baik untuk dikembangkan.

Langkah memformalkan pendidikan bagi para pengrajin tampaknya juga menarik. Mengingat sebagian masyarakat Jepara menganggap bahwa ketrampilan ini diperoleh secara turun-temurun. Meskipun sebenarnya di dalam masyarakat sendiri juga terdapat jenjang-jenjang agar seseorang bisa sampai pada taraf tukang ukir yang sebenarnya. Biasanya mereka *magang* dulu pada pengrajin yang sudah mandiri untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan sambil memperhatikan dengan seksama. Dengan demikian, pada saat itu tampaknya ada dua jalur pendidikan menjadi pengrajin, yaitu secara formal di sekolah dan langsung di masyarakat.

Perusahaan daerah yang ada tersebut hanya bertahan selama empat tahun. Dalam waktu yang bersamaan juga muncul usaha-usaha dari pedagang Tiong Hwa, yang menganggap bahwa industri kerajinan kayu mempunyai prospek yang baik. Dengan berhentinya perusahaan daerah pada tahun 1936, kemudian peralatannya diambil alih oleh Liem Hoo Gwan (Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara). Adapun pengusaha pribumi yang namanya cukup dikenal pada waktu itu adalah Haji Umar, dan pedagang China lainnya Thio Gwan Ien yang usahanya sekarang dilanjutkan putranya dengan nama Toko Pandjang dengan cabang-cabang di Semarang dan Jakarta.

Bahkan dalam perkembangannya untuk lebih memberdayakan kerajinan ukir, pada tahun 1963 dan tahun 1964, Kepala Djawatan Koperasi Daerah Tingkat I Djawa Tengah, mendirikan koperasi Industri Pertukangan Kayu di Panggang Djepara. Kemudian akta pendirian Koperasi Pertukangan Kayu “Sido Dadi”, yang berkedudukan di desa/kota Sukodono Jepara Daerah Tingkat II Djepara (Arsip Akta Pendirian, 1964, Dinarpus Jateng) . Pada tahun yang bersamaan juga didirikan Koperasi Perindustrian Pertukangan Kayu Suka Damai yang berkedudukan di Mantingan Jepara (Arsip Akta Pendirian, 1964, Dinarpus Jateng).

Bebepara organisasi dengan bentuk koperasi yang beranggotakan para pengusaha dan pengrajin mebel ukir antara lain Koperasi Mebel Ukir Tahunan Jaya yang didirikan pada tahun 1969. Koperasi ini sudah berbadan hukum dan beranggotakan 174 pengusaha yang pada umumnya bertempat tinggal di Tahunan (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979:78).

Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan pada tahun 1994 (*Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kerajinan Mebel Ukir Jepara, 1994*), dilaporkan bahwa koperasi tersebut mempunyai aset usaha di bidang penggergajian kayu dengan dua unit gergaji milik sendiri, kemudian ada penambahan 1 unit gergaji yang merupakan kerja sama dengan Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Semarang.

Pada tahun 1996, perkembangan koperasi belum banyak berarti. Bidang usaha yang ditekuni masih pada pelayanan jasa penjualan kayu dari Perum Perhutani dan Pelayanan Jasa Penggergajian (Koperasi Mebel dan Ukir Tahunan Jaya, *Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 1996*, Tahunan-Jepara, 1996, hal. 11).

Berdasarkan kondisi itu dapat dikatakan bahwa pendirian beberapa koperasi untuk menunjang peningkatan usaha di bidang industri kerajinan ukir berasal dari pihak pemerintah daerah. Hal ini tampak, karena pendirian koperasi bersamaan dengan kedatangan jatah kayu dari Perhutani pada pengrajin dan pengusaha swasta, terutama dengan tujuan mendorong perkembangan industri kerajinan ukir.

3.4 Memasuki Pasar Internasional

Pembenahan organisasi kerajinan ukir baru dilakukan setelah kemerdekaan, antara lain dengan pembentukan wadah organisasi. Koordinasi antar instansi, menurut Pemerintah Daerah merupakan langkah yang penting untuk diambil. Pada tanggal 2 Pebruari 1978 dibentuk Badan Pembina Kerajinan Kayu dan Ukir Jepara (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979: 74 – 76). Lembaga ini merupakan wadah koordinasi dari instansi untuk mengefektifkan pembinaannya. Beberapa instansi yang terlibat dalam badan ini antara lain: Pemerintah Kabupaten Dati II Jepara, DPRD Tingkat II Jepara, BNI 1946 Cabang Jepara dan Perum Perhutani Jepara (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979: 74 – 76).

Pada tahun 1970 didirikan Masyarakat Perakayuan Indonesia (MPI) dengan anggota 25 pengusaha yang mempunyai jaringan aktivitas di wilayah Kabupaten Jepara. Kemudian pada tahun 1975 di Kecamatan Jepara dengan wilayah aktivitas yang lebih kecil, didirikan Asosiasi Mebel Ukir Jepara dengan anggota 32 pengusaha. Organisasi yang diprakarsai Pemerintah Daerah dan pengusaha ini yang mampu bertahan cukup lama adalah Koperasi Kerajinan Mebel Ukir Jepara yang berdiri pada tahun 1976 dan sudah berbadan hukum dengan jumlah anggota pada waktu itu 194 pengusaha dengan lingkup aktivitasnya meliputi Kabupaten Jepara (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, 21 April 1979:78).

Pada waktu terjadi krisis moneter tahun 1996 Pemerintah Daerah Jepara merasa prihatin. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa krisis itu justru berdampak pada peningkatan keuntungan yang diperoleh para pengusaha dan masyarakat lainnya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat terjadinya kemajuan masyarakat itu, terutama berkaitan dengan kinerja pemerintahan daerah, kondisi pembangunan, tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang menunjukkan adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai (Kerjasama Bappeda Jepara dengan Lemlit Undip, 2005, hal. 60).

Berkaitan dengan pajak ekspor juga telah dilakukan upaya untuk memperjuangkan penghapusannya melalui kunjungan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) di Jepara pada bulan Agustus 1999 (*Gelora Bumi Kartini*, Edisi Agustus 1999). Usaha ini memperoleh hasil dengan pengabulan permohonan tersebut, bahkan kemungkinan akan ada penghapusan pajak ekspor untuk jenis industri yang lain.

Beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Jepara untuk menindaklanjuti kunjungan Memperindag tersebut antara lain: mengirimkan surat secara resmi untuk meminta kepastian dan mengajukan permohonan pemberian bantuan kredit mesin-mesin sederhana bagi pengrajin kecil seperti yang telah dijanjikan. Hal itu dimaksudkan agar semua order yang ada pada industri kerajinan ukir dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan kualitas yang baik sesuai yang diinginkan pemesan, mengingat masalah waktu dan standar kualitas merupakan hambatan yang cukup serius bagi para pengrajin dan eksportir. Usulan berikutnya adalah menyangkut ketersediaan bahan baku pendamping yang sulit dipenuhi dan sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin apabila terjadi perubahan nilai dollar.

Masalah lain yang juga mendapat perhatian cukup serius dari Pemerintah Daerah Jepara adalah penanganan orang asing yang tinggal di Jepara. Pemerintah Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) cukup mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah ini. Upaya-upaya yang terus dilakukan antara lain bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penertiban dengan cara mengadakan pendataan secara terus-menerus secara berkala setiap tahun dan mewajibkan warga asing untuk menaati ketentuan keimigrasian sesuai visa yang dimiliki (Alamsuah dan Sri Indrahti, 2000: 33).

Pihak Pemerintah Daerah tampaknya cukup membuka diri terhadap kehadiran pengusaha asing dengan catatan mereka harus menaati perundang-undangan yang berlaku termasuk masalah permodalan, yaitu dengan menggunakan sistem Penanaman Modal Asing (Alamsyah dan Sri Indarti, 2000: 34). Cara ini

dimaksudkan agar keberadaan mereka tidak berdampak negatif pada pertumbuhan pengusaha daerah, tetapi justru dapat memacu kemajuan yang telah berhasil dicapai.

Beberapa upaya untuk mempertemukan antara wakil pengusaha asing dan pengusaha daerah (pribumi) sudah sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah (*Gelora Bumi Kartini*, Januari 2000). Hal ini untuk mengantisipasi adanya ketidakharmonisan hubungan kedua belah pihak, terutama berkaitan dengan adanya sikap sekelompok pengusaha yang kurang menerima kehadiran mereka (*Gelora Bumi Kartini*, Januari 2000). Menurut Pemerintah Daerah apabila pengusaha asing trauma karena adanya penolakan terhadap kehadiran mereka, maka bisa terjadi pemindahan investasi ke tempat lainnya.

Beberapa pertemuan yang pernah dilakukan akhirnya menghasilkan komitmen antara pengusaha pribumi (daerah) – eksportir dan pengusaha asing. Pada pertemuan tanggal 13 Maret 1999 ditegaskan bahwa yang pada dasarnya Pemerintah Daerah dan masyarakat Jepara tidak menolak kehadiran pengusaha asing dan menerapkan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara PMA – PMDN dengan mengaktifkan wadah pengawasan orang asing serta bantuan LSM yang mempunyai perhatian dengan masalah tersebut (*Gelora Bumi Kartini*, Pebruari 2000).

Menurut Pemerintah Daerah Jepara, langkah ini perlu juga ditindaklanjuti dengan pembukaan perwakilan imigrasi di Jepara, kesadaran masyarakat untuk menerima kehadiran mereka, pembukaan kesempatan untuk melakukan transfer teknologi dari perusahaan asing pada perusahaan daerah, dan pengawasan terhadap orang-orang asing ilegal agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Beberapa langkah tersebut diakui belum seluruhnya dapat dilakukan terutama yang berkaitan dengan penertiban orang asing.

Munculnya sinyalemen berkaitan dengan tingkat penerimaan pengusaha asing di Jepara juga pernah mendapat tanggapan dari Duta Besar Belanda yang berkunjung ke Jepara pada awal tahun 2000 (*Suara Merdeka*, Jumat, 25 Februari 2000, hal. 14). Menurutnya, seandainya masyarakat Jepara menerima dengan terbuka kehadiran PMA, maka Kedutaan Besar Belanda akan mendatangkan banyak pengusaha untuk menanamkan investasinya. Akan tetapi apabila kehadiran mereka kurang diperlukan, maka mereka akan meninggalkan Jepara dan beralih ke negara lain. Pernyataan itu ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Jepara dengan menegaskan, bahwa kehadiran PMA amat diperlukan bahkan akan diberi kemudahan dalam pelaksanaannya dengan catatan telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jepara antara lain dengan Johor–Malaysia yang diwakili Wakil Menteri Besar Johor Y. B. Muhammad Salikon Sarpin. Hal ini mengindikasikan adanya ketertarikan pihak luar negeri terhadap hasil kerajinan ukir masyarakat Jepara (*Jawa Pos*, Jumat, 25 Agustus 2000: 6).

Di samping upaya-upaya untuk meningkatkan kemajuan yang sudah dicapai, Pemerintah Daerah Jepara juga mengambil langkah antisipasi, terutama setelah terjadinya penjarahan kayu yang muncul bersamaan dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998. Pihak Pemerintah Daerah Jepara berpendapat bahwa sebenarnya kalau diamati secara seksama, penjarahan berisiko tinggi bagi keberlangsungan industri kerajinan ukir, terutama berkaitan dengan upaya penjagaan kualitas untuk konsumsi luar negeri dan kelestarian hutan jati itu sendiri. Penjarahan hanya membawa keuntungan yang bersifat sementara dan konsumsi lokal. Dampak dari kemunculan penjarahan, antara lain memperrendah mutu barang yang dihasilkan, merusak nama baik (citra) Jepara sebagai daerah produksi kerajinan ukir, dan mendapatkan klaim dari pembeli di luar negeri. Beberapa kasus penjarahan sudah mulai diambil tindakan secara hukum meskipun pada umumnya masyarakat merasakan bahwa masalah ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Antusias terhadap ketersediaan bahan baku juga telah ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Jepara (*Gelora Bumi Kartini*, Maret 1997), antara lain dengan penancangan tahun 1997/1998 sebagai Tahun Budidaya Tanaman Jati dan Mahoni dan dijadikan sebagai awal gerakan hutanisasi oleh Bupati Jepara. Hasil yang tampak pada tahun 1997 hingga tahun 1999 telah ditanam bibit mahoni sebanyak 779.475 pohon, sengon 984.622 pohon, dan jati 8.900 pohon di atas hutan rakyat seluas 4.200 ha.. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan bahan baku yang semakin langka di Jepara.

Dengan adanya penjarahan, diperkirakan untuk tahun-tahun mendatang produksi kayu Jepara akan turun drastis (*Gelora Bumi Kartini*, Desember 1996). Program budidaya hutan jati ini diharapkan berlangsung sampai tahun 1999/2000 melalui kerja sama dengan Perhutani yang melakukan pembibitan jati di area seluas 5.000 meter kubik.

Pencanangan Tahun Budi Daya Jati dan Mahoni dilakukan di Desa Ngasem Kecamatan Batealit pada acara puncak Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (*Gelora Bumi Kartini*, Desember 1996). Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi kesulitan penyediaan bahan baku pada 15 (lima belas) tahun mendatang. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab Dinas terkait, Camat, dan Kepala Desa, yang juga diharapkan memperoleh perhatian dari para pengusaha dan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah

Jepara menyediakan bibit-bibit jati dan mahoni unggul, dan masyarakat menyediakan lahan di turus-turus jalan, batas kepemilikan, tanah kubur, dan lahan-lahan kritis yang jumlahnya mencapai 8.000 ha.. Menurut prediksi Pemerintah Daerah kalau upaya ini berhasil, maka Jepara akan menjadi hutan rakyat dan dapat memberikan jaminan bagi berlangsungnya industri kerajinan ukir.

Perkembangan industri kerajinan ukir ini menjadikan Jepara memperoleh pengakuan tingkat keberhasilan meningkatkan ekspor non-migas yaitu dengan meraih Samir-7 (Pita Dhuaja Dwibhakti Praja Nugraha). Pemberian penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Jepara di alun-alun Simpang Lima Semarang pada tanggal 27 Oktober 1997. Disamping itu juga terpilihnya dua pengusaha Jepara memperoleh Upakarti dari Presiden (*Gelora Bumi Kartini*, Oktober 1997). Hal ini tidak lepas dari langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengembangkan industri kerajinan ukir.

Terjadinya krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tampaknya tidak menggoyahkan roda perputaran usaha industri ini. Adanya dampak yang menguntungkan justru dirasakan pengusaha dengan menurunnya nilai tukar rupiah ini (*Gelora Bumi Kartini*, Desember 1997: 26). Indikator yang dipakai Pemerintah Daerah setempat dalam memaknai krisis moneter yang menguntungkan ini, antara lain, semakin meningkatnya jumlah penabung dalam tahun 1997 sebesar hampir 96%, jumlah jema'ah haji mencapai angka 1.400 orang serta pembelian sepeda motor baru setiap bulannya mencapai 1200 unit.

Keberhasilan yang telah dicapai Jepara perlu diimbangi dengan langkah-langkah antisipasi untuk mempertahankan atau mengembangkannya lebih lanjut. Hal yang cukup penting antara lain adalah menjalin mitra kerja antara PMA – PMD dan Pengusaha (Pengrajin), menciptakan situasi yang aman dan menghindari adanya kerusuhan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan yang cukup tinggi dalam menggalang hubungan mitra kerja. Dengan kondisi yang aman, keberadaan PMA akan merasa terjamin dan dapat bekerja dengan baik (Kerjasama Bappeda Jepara dengan Lemlit Undip. 2005, hal. 66)

Dari beberapa langkah yang sudah ditempuh oleh Pemerintah Daerah tampaknya perlu ada peningkatan dan sikap yang lebih aktif dari para pengusaha untuk menangkap peluang-peluang ((Kerjasama Bappeda Jepara dengan Lemlit Undip. 2005, hal. 67). Namun pada sisi lain, ada sekelompok pengusaha yang menganggap bahwa keberadaan PMA adalah saingan bagi mereka terutama PMA yang menyalahi aturan permainan dengan melakukan aktivitas produksi di Jepara secara langsung. Kelompok ini beranggapan bahwa PMA tersebut telah mengambil sebagian lahan usaha yang dahulu ditekuninya. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Daerah Jepara mengambil tindakan tegas agar tercipta rasa aman dalam melakukan aktivitas usaha bagi kelompok mana pun yang merasa ikut ambil bagian dalam upaya peningkatan industri kerajinan ukir.

4. Kesimpulan

Industri kerajinan ukir yang tumbuh dan berkembang selaras dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Jepara, serta menjadi identitas kota Jepara mengalami perkembangan pesat dengan permintaan pasar internasional pada sekitar tahun 1980-an. Tampaknya masa kejayaan tidak berlangsung lama, peningkatan pemasaran, produksi dan peningkatan tingkat kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat yang sekitar hanya berlangsung sebentar, memasuki tahun 1990-an sudah muncul berbagai persoalan yang berkaitan kekurangsiapan pelaku usaha menyambut pasar internasional, pemerintah daerah mengatur keberadaan pengusaha serta penjarahan hutan yang menurunkan kualitas barang produksi. Hal ini menjadi pembelajaran dalam mempersiapkan kerajinan lokal untuk mampu ikut bersaing dalam pasar internasional.

Daftar Pustaka

A. Sumber Primer

1. Arsip

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Akta Pendirian Koperasi Industri Pertukangan Kayu*, di Panggang Djepara, 14 Oktober 1963.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Akta Pendirian Koperasi Perindustrian Pertukangan Kayu Suka Damai*, di Panggang Djepara, 10 Juli 1964.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Akta Pendirian Koperasi Pertukangan Kayu Sidodadi*, di Panggang Djepara, 12 Juli 1964.

- Bappeda Jepara, *Daftar Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Dati II Jepara Tahun 2001*.
- Departemen Perdagangan dan Perindustrian. 1980. *Daftar Perusahaan Kerajinan Ukir di Kabupaten Jepara Tahun 1970-1979*.Jepara: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
- _____. 1990. *Daftar Perusahaan Kerajinan Ukir Tahun 1980-1989*. Jepara: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
- _____. 1995. *Daftar Perusahaan Kerajinan Ukir Tahun 1990-1994*.Jepara: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
- _____. 1995. *Daftar Banyaknya Unit Usaha Industri Di Kabupaten Dati II Jepara Diperinci Menurut Unit Usaha dan Tenaga Kerja Tahun 1995*. Jepara: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
- _____. 1995. *Daftar Banyaknya Eksportir Jenis Komoditi, Volume, dan Nilai Eksport di Kabupaten Jepara Tahun 1995*. Jepara: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

B. Sumber Sekunder

1. Buku, Artikel, Jurnal dan Wawancara

- Alamsyah dan Sri Indrahti. 1985. *Soenarto Karya dan Baktinya Bagi Jepara*, Pemda Kabupaten Dati II Jepara.
- Indrahti, Sri. 1989. *Peranan Jepara Sebagai Kota Bandar Pada Abad XVII*. Skripsi S1 – Jurusan Sejarah Fakultas sastra Undip.
- Indrahti, Sri. 2002. *Perkembangan Industri Kerajinan Ukir Di Jepara Tahun 1945-2001*. Tesis S2- Magister Humaniora Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan Budaya Fakultas Sastra UI.
- Indrahti, Sri, Singgih Tri Sulistyono, Yety Rochwulaningsih, Dhanang Respati P, Alamsyah. 2008. *Penggalian Nilai-Nilai Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Kerajinan Ukir Dalam Era Globalisasi*. Jepara : Kerja Sama Bappeda Pemab Jepara dan Lemlit Undip.
- Indrahti, Sri. 2013. *Industri Kerajinan Ukir Dalam Percaturan Pasar Internasional (Tahun 1945-2001)*. Semarang: Madani.
- Panitia Penyusun Hari Jadi Jepara. 1984. *Penetapan Hari Jadi Jepara*. Jepara : Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara. 1979. *Risalah dan Kumpulan Data Tentang Perkembangan seni Ukir Jepara*. Jepara: Pemerintah Daerah Jepara.
- Gustami, SP, *Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara* (Yogyakarta: Kanisius,2000).
- Gootschlak, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta : UI Press
- Hendro, Eko Punto. 1994. *Industri Tenun Ikat Troso Jepara:Sebuah Adaptasi Ekonomi*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Soemanto, Wasti. *Pendidikan Wiraswasta*.1984. Malang : Penerbit Bumi Aksara.
- Thohir, Mudjahirin. 1991. *Peranan Wong Pinter di Kalangan Masyarakat Pengrajin Ukir di Desa Sukodono-Jepara Jawa Tengah*. Tesis Pasca Sarjana UI.
- Tim Jurusan Sejarah Undip. 1992. *Invetarisasi dan Diskripsi Peninggalan Sejarah Di Kabupaten Dati II Jepara*. Semarang : Fakultas Sastra Undip.
- Weber, Max.2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (Terjemahan oleh Yusuf Priyasudiarja, Surabaya : Pustaka Promothea.
- C;ifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Terjemahan oleh Aswab Mahasin), Jakarta : Pustaka Jaya.

2. Majalah dan Koran

Kompas, Kamis, 6 Maret 1980.

Kompas, Rabu, 27 Agustus, 1980.

Kompas, Selasa, 17 januari 1989.

Kompas, Sabtu, 10 Juli 1993.

Kompas, Kamis, 22 Juli 1993.

Kompas, Senin, 14 April 1997.

Chicago Tribune (Chicago, Illinois), Sun, Nov 3, 1996 · Page 218

<https://www.newspapers.com/image/168652205> Downloaded on Mar 28, 2021

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) · Sun, Nov 3, 1996 · Page 218

<https://www.newspapers.com/image/168652205> Downloaded on Mar 28, 2021

Chicago Tribune (Chicago, Illinois). Sun, Sep 17-2000. Page 622.

<https://www.newspapers.com/image/169416504>

The Atlanta Constitution (Atlanta, Georgia) · 13 Aug 2000, Sun · Page 200

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) · Sun, Sep 17, 2000 · Page 622

The Signal (Santa Clarita, California) · 26 Jun 1999, Sat · Page 5 Downloaded on Mar 28, 2021

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi Desember 1996.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi Maret 1997.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi Agustus 1999.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi Januari 2000.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi Pebruari 2000.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi April 2000.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi September 2000.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi Agustus 2005.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi April 2006.

Pemda Jepara, *Gelora Bumi Kartini*, Edisi : 120/ Maret 2011

Suara Merdeka, Hari Kamis 11 Mei 2000.

Solo Pos, Minggu, 20 Juni 2021